

KONTESTASI ETNIS DI KANCAH POLITIK

ETHNIC CONTESTATION IN POLITICAL SCOPE

W Suprpto^{1a} dan D Kariadi¹

¹ Program Studi Bimbingan dan Konseling, STKIP Singkawang

^a Korespondensi: Wasis Suprpto, Email: wasissoeprapto@gmail.com

(Diterima: 28-05-2017; Ditelaah: 29-05-2017; Disetujui: 10-10-2017)

ABSTRACT

Multicultural city is very synonymous with Singkawang. This condition is seen from the Central Bureau of Statistics (BPS) data in 2004 which states that 40.38% of its citizens are ethnic Chinese, 36.72% Malays, 7.26% Dayak, 5.69% Madura, and 15.64% others. This diverse demographic pact can certainly be the beginning of ethnic contestation. This review was conducted to analyze the potential for political contestation in Singkawang. In general, the analysis conducted is literature study. In 2009, Kota Singkawang elected DPRD members through the election mechanism of regional head (Pemilukada). The number of contested positions reached 30 seats. Based on the literature analysis it is known that 30 elected DPRD members are from different tribes. After the assessment, 30% were ethnic Chinese, 27% Malays, 20% Dayak, 7% Madurese, Javanese, and Batak and 3% Tambi. Based on this data, it can be concluded that ethnic percentage correlates with ethnic representation in Pemilukada Kota Singkawang.

Keywords: contestation, ethnicity, and Singkawang.

ABSTRAK

Kota multikultural sangat identik dengan Singkawang. Kondisi ini terlihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 yang mengatkan bahwa 40,38% warganya adalah Etnis Tionghoa, 36,72% Melayu, 7,26% Dayak, 5,69% Madura, dan 15,64% lainnya. Pakta demografi yang beragam ini tentu dapat menjadi awal munculnya kontestasi antar etnis. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis potensi kontestasi politik di Singkawang. Secara umum analisis yang dilakukan bersifat studi literatur. Tahun 2009 lalu Kota Singkawang melakukan pemilihan Anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Adapun jumlah posisi yang diperebutkan mencapai 30 kursi. Berdasarkan analisis literatur diketahui bahwa 30 anggota DPRD yang terpilih berasal dari suku yang berbeda. Setelah dilakukan pengkajian ternyata 30% adalah Etnis Tionghoa, 27% Melayu, 20% Dayak, 7% Madura, Jawa, dan Batak serta 3% Tambi. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa persentase etnis berkorelasi dengan keterwakilan etnis pada Pemilukada Kota Singkawang.

Kata kunci: kontestasi, etnis, dan Singkawang.

Suprpto W dan D Kariadi. 2017. Kontestasi etnis di kancah politik. *Jurnal Sosial Humaniora* 8(2): 119 - 125.

PENDAHULUAN

Bulan Oktober ini pernah ada peristiwa bersejarah yang menandai tonggak awal

berdirinya entitas keindonesiaan. Pada saat itu rakyat Indonesia dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam satu tempat tertentu. Perkumpulan ini adalah sebuah momen yang sangat penting untuk

menyatukan semangat keindonesiaan. Semangat tersebut terlihat dari adanya rekonsiliasi rakyat dari latar belakang sosial yang beragam. Isu sosial seperti ras, suku, agama, bahasa, serta adat istiadat tidak menjadi unsur pemecah tapi justru penguat persatuan bangsa.

Secara historis bangsa ini memang tak dapat lepas dari fakta keberagaman. Situasi ini sendiri terjadi diberbagai penjuru negeri. Rasa senasib sebagai potret bangsa yang dijajah menjadi modal dasar terjadinya rekonsiliasi etnis. Pemuda saat itu menyadari betul bahwa negara ini susah merdeka jika rakyat yang hidup didalamnya bergerak sendiri tanpa adanya wadah persatuan. Oleh sebab itu, saat itu dicetuskan semangat Sumpah pemuda.

Pada perkembangannya peristiwa sumpah pemuda memiliki peran yang sangat strategis bagi perkembangan sejarah kehidupan berbangsa Indonesia. Hasil ikrar sumpah pemuda telah menjadi semangat bagi seluruh lapisan rakyat. Ikrar itu setidaknya menyepakati tiga poin sebagai berikut:

(1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, (2) kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, (3) kami putra dan putri Indonesia menunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Ketiga poin di atas menjadi pondasi dasar yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga prinsip inilah yang menyatukan keberagaman rakyat Indonesia bahkan hingga saat ini.

Dalam konteks kekinian, makna dan semangat sumpah pemuda tetap jadi modal dasar kehidupan berbangsa di negeri ini. Negeri Indonesia tetap hidup karena rakyatnya telah menginternalisasi semangat Sumpah Pemuda. Rakyat sadar bahwa keutuhan negara ini berasal dari perbedaan itu sendiri. Rasa toleransi dijaga dan dijadikan landasan dalam menata kehidupan berbangsa di negeri ini. realita sosial seperti ini sejatinya tumbuh di berbagai daerah

seperti halnya di Kota Singkawang Kalimantan Barat.

Singkawang adalah salah satu kota di Propinsi Kalimantan Barat. Kota ini sendiri mendapatkan banyak julukan baik sebagai Kota Amoy maupun Kota 1000 Klenteng. Kota ini telah mengajarkan tentang konsep internalisasi nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sosialnya dalam wadah pembauran. Wujud pembauran terlihat dari kesamaan konsep hidup bersama antar berbagai elemen masyarakat. Pembauran itu mampu menghilangkan sekat-sekat atau rasa sentimen seseorang atas dasar kedaerahan atau latar belakang tertentu sudah ditinggalkan.

Namun demikian, tidak semua hal dapat berjalan beriringan khususnya dalam ranah politik. Berbicara politik tentu tidak lepas dari konteks *bargaining position* atau posisi tawar. Posisi tawar disini tidak hanya mengacu pada pribadi tapi juga pada etnis dan masyarakat setempat. Contoh nyatanya dalam kasus pemilihan Presiden di negeri ini. Presiden Indonesia harus orang Jawa meski tidak ada satupun sumber hukum di negeri ini yang mengatakan demikian. Namun, faktanya Presiden era reformasi ini adalah orang Jawa. Kondisi ini terjadi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Jawa.

Komposisi penduduk nampaknya punya hubungan kuat dengan ranah politis. Seperti diketahui bahwa Singkawang didominasi oleh tiga etnis yaitu Tidayu (Tionghoa, Dayak, dan Melayu). Ketiga etnis ini secara langsung maupun tidak pasti juga berjuang agar dapat mendapatkan posisi tawar yang menjanjikan terutama dalam hal politik. Kondisi inilah yang disadari betul khususnya oleh para kelompok kepentingan yang berasal dari etnis-etnis tertentu di Kota Singkawang.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode dokumentasi. Metode ini akan mencari data dari suatu variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan

sebagainya (Arikunto 2002). Mengacu pada pendapat Arikunto tersebut terlihat bahwa semua dokumen yang didalamnya memiliki informasi relevan dapat digunakan untuk mendukung kajian dari suatu penelitian. Data pendukung tersebut pada dasarnya memiliki peranan yang besar untuk menentukan hasil dari suatu kajian.

Data yang bersumber dari dokumentasi selanjutnya dianalisis. Analisis ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang didalamnya berusaha mengumpulkan dan menyusul data kemudian dianalisis (Winarno 1990). Analisis disini berupa kata-kata, gambar, serta angka meski penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Meleong (2000) menambahkan bahwa semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Kondisi ini terjadi karena satu dokumen dapat saling melengkapi atau mendukung satu sama lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman sangat tepat untuk menggambarkan corak kehidupan sosial masyarakat di Kota Singkawang. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari banyak aspek baik bahasa, agama, maupun etnisnya. Seperti yang telah disinggung di awal bahwa etnis di Kota Singkawang didominasi oleh masyarakat Tionghoa, Dayak, dan Melayu (Tidayu). Selain itu, ada juga beberapa etnis lain di kota ini seperti etnis Madura, Jawa, Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Potret keberagaman etnis di Singkawang akan menambah khasanah bagi kehidupan sosial masyarakatnya (Tabel 1).

Berdasarkan data persentase suku bangsa Kota Singkawang di atas di ketahui bahwa jumlah suku di Singkawang kurang merata. Ketidakteraturan itu terlihat dari rasio atau banyaknya jumlah suku di suatu daerah. Mengacu pada data yang tersedia di atas diketahui bahwa masyarakat mayoritas di Kota Singkawang adalah orang Tionghoa. Masyarakat Tionghoa memiliki persentase 40,38% di susul oleh Melayu 36,72%, Dayak

7,26%, Madura 5,69%, serta lainnya dengan 9,9%.

Tabel 1 Persentase suku bangsa di kota Singkawang

No.	Suku Bangsa	Persentase %
1.	Tionghoa	40,38
2.	Melayu	36,72
3.	Dayak	7,26
4.	Madura	5,69
5.	Lainnya	9,95
Jumlah		100

Sumber: BPS Kota Singkawang Tahun 2004

Masyarakat Singkawang juga sangat beragam dalam konteks agama. Data BPS Tahun 2004 mengatakan bahwa 44,9% masyarakat menganut agama Budha atau agama mayoritas masyarakat Kota Singkawang. Oleh sebab itu, julukan sebagai Kota Seribu Vihara melekat pada Kota Singkawang. Adapun sisanya yaitu sebesar 39,35% Islam, 8,71% Katholik, 6,50% Protestan, dan 0,62% adalah Hindhu. Mengacu pada data ini terlihat bahwa agama yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Singkawang beragam.

Persebaran jumlah penduduk Kota Singkawang yang tidak merata tentu akan berimbas pada semua sektor kehidupan. Sektor dalam kontes ini berkaitan atau berkorelasi langsung dengan bidang seperti ekonomi, sosial budaya, serta politik. Di bidang ekonomi masyarakat Singkawang yang multi etnis bersaing dalam dunia usaha. Di bidang sosial budaya terjadi kontak antara entis sehingga memungkinkan terjadinya akulturasi maupun asimilasi antar budaya. Di bidang politik tentu berkaitan dengan keterwakilan entis tertentu di kancah perpolitikan Kota Singkawang.

Kasus yang terbaru terjadi saat pemilihan umum daerah (Pemilukada) di Kota Singkawang Tahun 2009 lalu. Pada saat itu para politisi dari berbagai latar belakang ikut andil dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Tujuannya jelas yaitu untuk menyalurkan aspirasi rakyat dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh sebab itu, semua orang

dari berbagai latar belakang itu berlomba-lomba untuk dapat menarik simpati dari rakyat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kampanye.

Kampanye adalah salah satu bumbu utama dalam pemilihan umum (Pemilu). Kampanye dipadang sebagai suatu keharusan dalam proses politik di negeri ini. Hal ini terjadi karena melalui kampanyealah seorang calon pemilih tahu para kandidat calon wakil rakyat. Setelah calon pemilih tahu maka selanjutnya mereka dapat menentukan kira-kira kandidat calon wakil rakyat mana yang sesuai dengan hati mereka.

Hati nurani rakyat sebaiknya harus disertai kemampuan analisis yang baik. Kemampuan analisis disini berupa kepekaan untuk menganalisis visi dan misi para calon wakil rakyat. Apalagi, suara antara seorang yang memilih berdasarkan analisis dengan yang tidak menggunakan analisis dianggap sama. Hal ini terjadi karena memang Indonesia menganut sistem kesetaraan termasuk dalam hal suara. Oleh sebab itu, maka dalam memberikan suara seorang pemilih haruslah cermat memilah dan memilih calon yang akan dipilihnya.

Setiap warga negara diberikan hak yang sama. Cholisin, dkk (2005: 85) mengatakan bahwa hak-hak sebagai warga sipil antara lain (1) untuk memilih atau memberikan suara, (2) kebebasan berbicara, (3) kebebasan pers, (4) kebebasan beragama, (5) kebebasan bergerak, (6) kebebasan

berkumpul, dan (7) kebebasan dari kesewenang-wenangan dari sistem politik atau hukum. Dari ketujuh hak yang ada salah satu yang paling jelas dalam konteks politik adalah hak untuk memilih atau memberikan suara. Dalam kaitan itu, proses pemberian suara akan terlihat saat pesta demokrasi rakyat.

Pesta demokrasi harus dilaksanakan dalam suatu sistem politik. Tujuan dari pesta demokrasi ini adalah sebagai wujud pelibatan paling nyata masyarakat untuk memilih calon wakil rakyat. Namun demikian, tidak semua warga negara boleh ikut dalam pesta demokrasi salah satunya karena faktor umur. Sesuai peraturan yang berlaku dijelaskan bahwa seseorang yang boleh terlibat dalam proses demokrasi ialah yang berusia minimal 17 tahun. Peraturan ini berlaku untuk semua kalangan di semua daerah di penjuru tanah air.

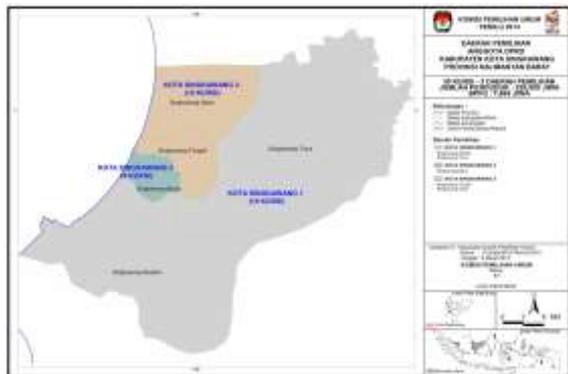
Sebelum pelaksanaan pesta demokrasi rakyat biasanya akan dilakukan proses pendataan jumlah pemilih. Data jumlah pemilih yang akurat akan berperan besar dalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu, keakuratan data diperlukan untuk menghadapi klaim atau tuntutan ketidakpuasan calon. Kondisi ini terjadi pada semua proses Pemilu maupun Pemilukada di Indonesia misalnya saja di Kota Singkawang. Berikut adalah hasil pendataan jumlah pemilih tetap yang diberikan hak memilih saat Pemilukada Kota Singkawang dilakukan.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Singkawang Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
1.	Singkawang Timur	10.067	8.664	18.731	11%
2.	Singkawang Tengah	26.681	25.427	52.108	29%
3.	Singkawang Barat	24.817	23.754	48.571	27%
4.	Singkawang Utara	10.243	9.613	19.856	11%
5.	Singkawang Selatan	20.027	17.602	37.629	21%
	Jumlah	91.835	85.060	176.895	100%

Sumber: BPS Kota Singkawang Tahun 2008

Jumlah penduduk yang banyak akan berimbas pada penyediaan tempat pemungutan suara saat Pemilukada berlangsung. Saat Pemilukada tahun 2009 berlangsung daerah pemilihannya terbagi menjadi tiga. Ketiga tempat pemilihan yaitu (1) Singkawang Barat, (2) Singkawang Utara dan Tengah, (3) Singkawang Timur dan Selatan seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Singkawang

Berdasarkan gambar 1 di atas diketahui bahwa kuota tiap daerah pemilihan berbeda-beda. Penentuan kuota tersebut ditentukan oleh jumlah penduduk di suatu kecamatan tertentu. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk banyak maka kuota keterwakilannya pun banyak. Di daerah pemilihan satu yang mencakup Singkawang Timur dan Selatan ada 10 kursi. Di daerah pemilihan dua yaitu Singkawang Barat ada 8 kursi. Adapun daerah pemilihan tiga yaitu Singkawang Utara dan Tengah ada 12 kursi. Total kursi anggota DPRD Kota Singkawang yang diperebutkan dalam Pemilukada 2009-2014 adalah 30 kursi.

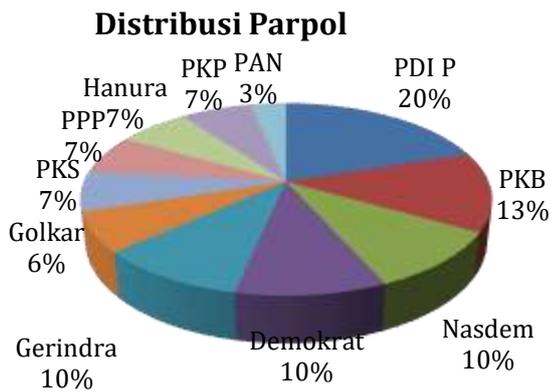
30 kursi dalam Pemilukada 2009 diperebutkan seseorang atas dasar etnis yang ada di Singkawang. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) tahun 2009 diperoleh data seperti tabel 3.

Tabel 3. Daftar Anggota DPRD Singkawang 2009-2014

No.	Partai	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Jumlah
1.	PDI P	Lie Kian Loy, Su Mian	Tjhai Chui Mie, Anton Triadi, Sujianto	Rusdi	6
2.	PKB	Sun Silfendi	Sun Vonny	Husin, Karmayadi, S.Ag	4
3.	Nasdem	Anewan, A.Md	Sumberanto Tjitra	Tjuang Kie Tjin	3
4.	Demokrat	Theresia Pones S.Pd	Tambok Pardede, SH	Drs. Tavip Putra Purba	3
5.	Gerindra	Victorianus	Dino Sanjaya, SH	Tasman, S.Pd	3
6.	Golkar	Angguang, SH	-	Hariyanto	2
7.	PKS	Sesanti Pantbary	-	Soldi M Idris	2
8.	PPP	Eka Chandra	-	Surianti, SP	2
9.	Hanura	Lie Kim Tjun	-	Ronny Burhan	2
10.	PKP	-	Lo Abidin	Nehemia	2
11.	PAN	-	-	Muhammaddin SE	1
Total		10 kursi	8 kursi	12 kursi	30

Mengacu pada tabel 3 di atas diketahui pula bahwa sebaran kendaraan politik pada Pemilukada di Kota Singkawang merata. Hal ini ditandai dengan adanya wakil rakyat yang diusung oleh beberapa partai politik besar di Indonesia. Namun demikian, distribusi tiap partai politik tidak contohnya PDIP yang berhasil menempati 6 wakil atau 20% di

Pemilukada Kota Singkawang. PKB ada di urutan kedua dengan 4 wakil atau 13%. Nasdem, Demokrat, serta Gerindra di urutan ketiga dengan 3 wakil atau 10%. Golkar, PKS, PPP, Hanura, dan PKP di urutan keempat dengan 2 wakil atau 7%, serta PAN dengan 1 wakil atau 3% seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1 Distribusi Parpol di Pemilu Kota Singkawang Tahun 2009

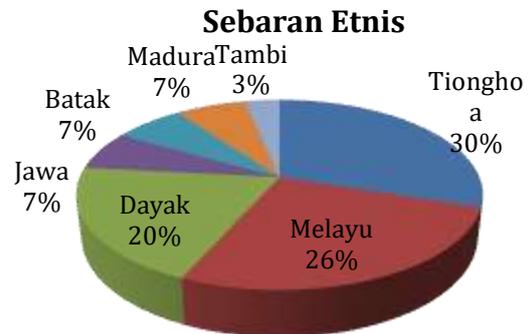
Masih mengacu pada tabel 3 di atas diketahui bahwa para anggota DPRD Kota Singkawang yang terpilih berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumberanto Tjitra pada tanggal 22 Oktober 2015 diketahui bahwa anggota DPRD Kota Singkawang sangat multikultural. Sumberanto Tjitra juga menambahkan bahwa anggota DPRD Kota Singkawang mayoritas didominasi oleh tiga etnis utama yaitu Tidayu dan sisanya etnis yang lain seperti terlihat dari tabel dibawah ini

Tabel 2. Distribusi Etnisitas Anggota DPRD Kota Singkawang

Etnis	Jumlah	Persentase
Tionghoa	9 orang	30%
Melayu	8 orang	27%
Dayak	6 orang	20%
Madura	2 orang	7%
Jawa	2 orang	7%
Batak	2 orang	7%
Tambi	1 orang	3%

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa sebaran atau keterwakilan etnis pada Pemilu Daerah di Kota Singkawang merata. Kondisi ini terlihat dari adanya jumlah etnis yang sangat mendominasi dan ada pula etnis yang kurang atau kalah bersaing. Pada Pemilu 2009 diketahui bahwa Anggota DPRD Kota Singkawang dari etnis Tionghoa berjumlah 9 orang atau 30%. Etnis Melayu menduduki urutan kedua dengan 8 orang atau 27%, disusul oleh Dayak dengan 6 orang atau 20%, Batak, Jawa, dan Madura dengan 2

orang atau 7%, dan Tambi (keturunan Arab) yaitu 1 orang atau 3% seperti terlihat dari gambar dibawah ini



Gambar 2 Distibusi Etnis pada Pemilu Kota Singkawang Tahun 2009

Mengacu pada gambar 2 di atas diketahui bahwa pembelajaran politik di Kota Singkawang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya deskriminasi politik dalam konteks kehidupan berpolitik masyarakat Kota Singkawang. Semua orang dari berbagai latar belakang tertentu diberikan peluang atau kesempatan yang sama dalam berpolitik. Orang yang berbeda bahasa, agama, cirri fisik, maupun budaya punya posisi tawar yang sama satu sama lain. Realita ini menandakan bahwa hakekat kehidupan bersama sebagai entitas bangsa telah berjalan dengan sangat baik.

Kehidupan yang harmonis dan penuh dengan rasa kekerabatan memang harus ditanamkan sejak dini. Salah satu wujud pengaplikasiannya adalah melalui ranah politik. Berbicara politik dalam konteks keberagaman maka semua pihak yang merasa berbeda sama-sama menekan ego masing-masing. Tujuan dari ini semua adalah untuk menciptakan kehidupan sosial yang penuh rasa kekeluargaan ditengah-tengah perbedaan. Perbedaan itu indah dan sudah tidak zamannya lagi mengulik perbedaan. Sebagai anak bangsa mari sama-sama berjuang memajukan Indonesia tanpa mendikotomikan orang atas dasar perbedaan yang melingkupinya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan analisis pustaka yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Distribusi atau sebaran anggota DPRD Kota Singkawang ditinjau dari latar belakang etnisitas sangat multikultural. Hal ini terlihat dari adanya wakil dari setiap etnis tertentu baik yang terkategori etnis mayoritas maupun minoritas. Seperti diketahui bahwa 30% anggota DPRD Kota Singkawang adalah Etnis Tionghoa, 27% Melayu, 20% Dayak, 7% Madura, Jawa, dan Batak serta 3% Tambi. Data ini sangat sebanding dengan besaran jumlah etnis yang ada di Kota Singkawang.
2. Distribusi atau sebaran anggota DPRD Kota Singkawang ditinjau dari latar belakang Partai Politik pengusung relatif merata. Merata dalam konteks ini di setiap Parpol pasti ada wakilnya hanya

saja yang membedakan kuantitas yang mampu melenggang menjadi anggota DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang. 2004. *Kota Singkawang dalam Angka 2004*. Singkawang: BPS Kota Singkawang.
- Cholisin, dkk. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Uny Press
- Moleong, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Winarno, Surachman 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita